

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian Keuangan Daerah, pasal 79 sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, yaitu: Hasil Pajak Daerah, Hasil restribusi Daerah, Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (UU Otonomi Daerah No.22 1999:34).<sup>1</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2008), 2008, hal 7

<sup>2</sup> Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal 94

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah-daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber dana pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan pinalti, yang berfungsi sebagai dana untuk membangun serta sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Perkembangan pajak yang mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan tetapi hanya pemberian suka rela dari rakyat kepada raja dalam pemeliharaan kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara dari serangan musuh dari luar, membuat jalan umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Selain itu pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis,

<sup>3</sup> Muda Markus. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. (Jakarta:PTGamedia Pustaka Utama, 2005), cet. ke-1, hal. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendeta, orang tua, penderita penyakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus membayar pajak adalah orang najran yang beragama Kristen pada tahun keenam Hijriyah dan penduduk asli Ailah, Adzur, serta Adziat pada perang tabuk. Sistem ini terus berlanjut sampai masa pemerintahan Khilafah harun Ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M).<sup>4</sup>

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminology *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah* karya *Imam Al Mawardi*, *Kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya *Imam Syafi'i*, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah, kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Adiwirman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2008), hal. 25.

<sup>5</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 28-29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu penyumbang terhadap pendapatan asli daerah, maka setiap daerah harus mampu untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.<sup>7</sup>

Pajak yang dapat menyumbang pendapatan daerah bagi suatu wilayah yang ada di Indonesia adalah pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan objek pajak bagi Kabupaten Kampar yang memberikan kontribusi

<sup>6</sup> Mardiasmo, *op cit*, hal 7

<sup>7</sup> Juliantika dan Budi Tri Raharjo, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, 2017, hal 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Saat ini penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kabupaten Kampar terus meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dealer kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan. Dengan semakin banyaknya merek dan jenis kendaraan bermotor, maka produsen kendaraan bermotor saling bersaing dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempermudah dan menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Pada tahun 2015 Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Kampar ditargetkan sebesar Rp. 785.31 M, sementara itu hingga akhir 2015 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor baru mencapai angka Rp. 647.92 M. Sehingga masih belum dapat untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar, karena target yang ingin dicapai tidak maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus lebih berusaha lagi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Mardiasmo “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasitersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif”.<sup>8</sup> Menurut Abdul Halim “Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli

<sup>8</sup> Mardiasmo, *op cit*, 134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah”.<sup>9</sup>

Dengan melihat pendapatan asli daerah dari sector pajak, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan asli daerah Kabupaten Kampar dari sector Pajak Kendaraan Bermotor masih kurang efektif. Karena belum mampu untuk mencapai penerimaan pajak secara optimal. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Ekonomi Islam

## B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan mendalam, serta terhindar dari berbagai penyimpangan dari inti permasalahan, maka peneliti membatasi fokus penelitian ini pada beberapa hal, yaitu: 1) Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor, 2) Pendapatan Asli Daerah, 3) Kabupaten Kampar, dan 4) ditinjau dari Ekonomi Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar?

---

<sup>9</sup> Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. ( Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 135

2. Bagaimanakah tingkat PAD Kampar dari pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimakah pandangan Ekonomi Islam terhadap pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimanakah Strategi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui tingkat PAD Kampar dari pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu mafaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk Menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
2. Menambah wawasan bagi penulis tentang pajak kendaraan bermotor.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan informasi kepada Dinas Pendapatan Daerah dan kiat –kiat yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.
4. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature Ekonomi Islam di perpustakaan UIN SUSKA Riau.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik serta sistematis.<sup>10</sup>

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, ada pun lokasi penelitian ini dilakukan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

<sup>10</sup> Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta,2010. Hal 5



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.74, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar, serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kampar yang berlokasi di Jl. Letnan Boyak No.74, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar,

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

#### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan.

##### a. Informan

Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan, proses penelitian langsung dari suatu informasi ke informasi lainnya. Informan penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan secara memberi informasi secara akurat dalam permasalahan penelitian ini.

TABEL 1.1:  
INFORMAN PENELITIAN (KEY INFORMAN)

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar	1 orang
2	Seksi Anggaran Pendapatan	1 orang
3	Kepala Samsat Kabupaten Kampar	1 orang
4	Masyarakat	5 orang

Sumber Data Olahan 2016

b. Media Masa

Merupakan saran informasi berupa penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Penggunaan media masa pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen, maupun informasi yang relevan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, laporan, artikel *online*, jurnal *online*, catatan serta dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa cara yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto-foto pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data penulis. Adapun yang diobservasi ke lapangan adalah kondisi pelayanan yang ada pada Kantor Samsat Bangkinang yang menjadi tempat membayar pajak kendaraan bermotor.

#### 5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, maka analisa data yang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis gunakan adalah data analisis deskriptif yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

**6. Metode Penulisan**

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum
- c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, terdiri dari sejarah berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**, terdiri dari sejarah pemungutan pajak, pengertian



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fungsi pajak, asas pemungutan pajak, sistem perpajakan, wajib pajak dan subjek pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, tarif kendaraan bermotor, cara pembayaran pajak, masa pajak, dan retribusi, pajak kendaraan bermotor menurut perspektif Ekonomi Islam

**BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN,** terdiri dari tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar ditinjau menurut Ekonomi Islam, tingkat PAD Kampar dari pajak kendaraan bermotor pandangan Ekonomi Islam terhadap pajak kendaraan bermotor, serta strategi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor

**BAB V : PENUTUP,** Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini